

REPRESENTASI KINERJA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN BENCANA BANJIR SUMATERA 2025 (ANALISIS ISI KUANTITATIF SENTIMEN BERITA PADA MEDIA NASIONAL)

¹Nurdyansa*, ²Abdul Halim, ³Fatma

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Pancasakti, Kota Makassar¹

Program Studi Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pancasakti, Kota Makassar^{2,3}

Email : nurdyansa@gmail.com^{1*}

Keyword: *Content Analysis, Government Performance, Natural Disaster, Media Sentiment, Accountability.*

Abstract: *Natural disaster management represents a critical test for government accountability and responsiveness within the modern governance paradigm. This study aims to analyze the representation of central and regional government performance in handling the 2025 Sumatra flood disaster through national media coverage. Using quantitative content analysis method, this research coded 150 news articles from three major national media outlets (Kompas.com, Detik.com, and Antara News) during the emergency response period from January to February 2025. Results show significant sentiment polarization with 55% negative-toned news, 35% positive, and 10% neutral. Positive narratives were dominated by executive leadership visits and budget commitments, while negative narratives focused on evacuation delays and victim data inconsistencies. These findings indicate that although the government attempted to build a responsive image through symbolic communication, media continued to function as a social accountability mechanism highlighting gaps between official narratives and field realities. This study concludes that integration of political science and communication is necessary to understand public image dynamics in crisis management, emphasizing the importance of data transparency as a foundation for public trust.*

Kata Kunci: *Analisis Isi, Kinerja Pemerintah, Bencana Alam, Sentimen Media, Akuntabilitas.*

Abstrak: *Penanganan bencana alam merupakan uji kritis bagi akuntabilitas dan responsivitas pemerintah dalam paradigma tata kelola pemerintahan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi kinerja pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan bencana banjir Sumatera tahun 2025 melalui pemberitaan media nasional. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis), penelitian ini mengkode 150 artikel berita dari tiga media nasional utama (Kompas.com, Detik.com, dan Antara News) selama periode tanggap darurat Januari hingga Februari 2025. Hasil penelitian menunjukkan polarisasi sentimen yang signifikan di mana 55% berita bernada negatif, 35% positif, dan 10% netral. Narasi positif didominasi oleh kunjungan kepemimpinan eksekutif dan komitmen anggaran, sedangkan narasi negatif berfokus pada keterlambatan evakuasi dan inkonsistensi data korban. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah berupaya membangun citra responsif melalui komunikasi simbolis, media tetap berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas sosial yang menyoroti kesenjangan antara narasi resmi dan realitas*

lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ilmu pemerintahan dan komunikasi diperlukan untuk memahami dinamika citra publik dalam manajemen krisis, serta menekankan pentingnya transparansi data sebagai fondasi kepercayaan publik.

PENDAHULUAN

Bencana alam dalam konteks pemerintahan kontemporer bukan sekadar peristiwa fisik atau kemanusiaan, melainkan juga peristiwa politik dan komunikasi yang menguji legitimasi serta kapasitas negara. Di Indonesia, manajemen bencana melibatkan koordinasi kompleks antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga non-kementerian seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Efektivitas penanganan bencana sering kali menjadi indikator utama bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan yang sedang berjalan (Nugroho dkk., 2021). Namun, penilaian publik ini tidak terbentuk secara langsung dari realitas lapangan semata, melainkan melalui mediasi informasi yang disediakan oleh media massa. Dalam era demokrasi digital, media berperan sebagai pintu gerbang utama yang membentuk persepsi masyarakat mengenai kompetensi dan integritas pemerintah (Pratama & Hidayat, 2023).

Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi pemerintahan Indonesia yang diuji dengan bencana banjir skala besar yang melanda wilayah Sumatera. Peristiwa ini menarik perhatian nasional karena melibatkan respons langsung dari tingkat presiden hingga kepala daerah. Cara media memberitakan kinerja pemerintah selama krisis tersebut memiliki implikasi serius terhadap kepercayaan publik dan stabilitas politik. Media massa berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi kinerja birokrasi, namun di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan media untuk manajemen kesan (impression management) guna menjaga stabilitas narasi publik (Siregar dkk., 2022). Terdapat ketegangan inheren antara upaya pemerintah dalam menyajikan narasi keberhasilan melalui rilis resmi dan investigasi media yang sering kali mengungkap kegagalan di lapangan.

Fenomena ini menjadi semakin kompleks dengan berkembangnya ekosistem media digital di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penetrasi internet mencapai 78% pada tahun 2024, dengan mayoritas pengguna mengakses berita melalui platform online. Kondisi ini mempercepat sirkulasi informasi namun juga meningkatkan risiko diseminasi informasi yang tidak terverifikasi. Dalam konteks bencana, kecepatan informasi sering kali mengorbankan akurasi, menciptakan ruang bagi narasi yang bertentangan antara versi pemerintah dan versi masyarakat terdampak.

Penelitian terdahulu sering kali memisahkan analisis kinerja pemerintahan dari analisis pemberitaan media. Studi dalam ilmu pemerintahan cenderung fokus pada evaluasi kebijakan dan output birokrasi, sementara studi ilmu komunikasi lebih menitikberatkan pada efek media dan framing berita. Padahal, dalam ekosistem informasi saat ini, kinerja pemerintah sering kali dinilai berdasarkan representasinya di media. Jika media secara dominan memberitakan kegagalan, maka legitimasi pemerintah dapat tergerus meskipun secara teknis bantuan telah disalurkan (Wibowo & Kusuma, 2024). Kesenjangan literatur ini perlu diisi dengan penelitian yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk memahami bagaimana kinerja pemerintah dikonstruksi dalam wacana publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah spesifik yang memerlukan perhatian akademis. Pertama, terdapat kesenjangan teoretis dimana belum banyak penelitian yang mengintegrasikan perspektif ilmu pemerintahan (akuntabilitas, responsivitas) dengan ilmu komunikasi (analisis sentimen, framing) dalam konteks penanganan bencana di Indonesia. Kebanyakan studi cenderung berdiri sendiri dalam disiplin masing-masing tanpa dialog interdisipliner yang memadai. Kedua, terdapat kesenjangan empiris berupa minimnya studi yang mengukur secara kuantitatif proporsi sentimen media terhadap kinerja pemerintah saat krisis,

khususnya pada peristiwa banjir Sumatera 2025 yang melibatkan respons tingkat presiden. Studi-studi yang ada lebih banyak bersifat kualitatif dengan sampel terbatas sehingga sulit digeneralisasi. Ketiga, terdapat kesenjangan metodologis dimana banyak analisis isi media masih bersifat kualitatif-deskriptif tanpa pengukuran statistik yang dapat digeneralisasi, sehingga sulit membandingkan temuan antarstudi. Hal ini membatasi akumulasi pengetahuan dalam bidang komunikasi krisis dan tata kelola bencana.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, rumusan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proporsi sentimen positif, negatif, dan netral dalam pemberitaan media nasional terkait kinerja pemerintah dalam penanganan banjir Sumatera 2025? (2) Apa tema dominan yang membentuk sentimen positif dan negatif tersebut? (3) Bagaimana perbedaan pola pemberitaan antara media independen dan media berafiliasi pemerintah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif distribusi sentimen berita (positif, negatif, netral) dalam pemberitaan media nasional mengenai penanganan banjir Sumatera 2025. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi tema-tema dominan yang membentuk narasi positif dan negatif terkait kinerja pemerintah pusat dan daerah. Tujuan ketiga adalah menganalisis perbedaan pola framing antara media independen (Kompas.com, Detik.com) dan media pemerintah (Antara News) dalam merepresentasikan kinerja penanganan bencana. Akhirnya, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi pemerintah dalam meningkatkan strategi komunikasi krisis dan akuntabilitas publik saat bencana..

METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain analisis isi kuantitatif (quantitative content analysis) untuk mengukur pola pemberitaan secara objektif, sistematis, dan dapat direplikasi. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengtransformasi data kualitatif berupa teks berita menjadi data kuantitatif yang dapat diuji secara statistik (Krippendorff, 2018; Lacy dkk., 2020). Pendekatan kuantitatif memungkinkan generalisasi temuan dan perbandingan yang rigor antar media, sementara integrasi dengan kerangka teoretis ilmu pemerintahan memberikan kedalaman interpretatif pada angka-angka yang dihasilkan.

Desain penelitian mengikuti prosedur standar analisis isi yang meliputi: (1) formulasi pertanyaan penelitian, (2) definisi populasi dan sampel, (3) pengembangan kategori koding, (4) pelatihan koder dan uji reliabilitas, (5) koding data, (6) analisis statistik, dan (7) interpretasi temuan. Seluruh prosedur didokumentasikan secara transparan untuk memungkinkan replikasi oleh peneliti lain.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh berita online yang terbit pada periode tanggap darurat bencana banjir Sumatera, yaitu dari 1 Januari 2025 hingga 21 Februari 2025. Periode ini dipilih untuk mencakup fase respons awal hingga fase pemulihan awal, yang merupakan momen kritis bagi pembentukan persepsi publik. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tiga bulan pertama pasca-bencana merupakan window of opportunity bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik melalui respons yang efektif. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi yang ketat. Pertama, artikel harus diterbitkan oleh media nasional kategori berita umum: Kompas.com, Detik.com, dan Antara News. Kedua, artikel harus mengandung minimal satu kata kunci: "Banjir Sumatera", "Penanganan Bencana", "Pemerintah", "Presiden", "Prabowo", atau "BNPB". Ketiga, artikel berupa berita hard news (bukan artikel opini, tajuk rencana, feature, atau editorial). Keempat, artikel berbahasa Indonesia dan dapat diakses secara publik. Setelah proses penyaringan menggunakan advanced search dengan Boolean operator, total sampel yang memenuhi kriteria adalah 150 artikel berita, dengan pembagian proporsional: 50 artikel untuk masing-masing media. Pemilihan ketiga media ini didasarkan pada variasi afiliasi dan karakteristik audiens: Kompas.com mewakili media arus utama yang kritis dengan pembaca terdidik, Detik.com

mewakili media digital dengan kecepatan tinggi dan penetrasi luas di kalangan generasi muda, dan Antara News mewakili perspektif media pemerintah dengan akses informasi resmi.

Instrumen dan Prosedur Koding

Unit analisis adalah artikel berita utuh (full-text articles). Variabel utama yang diukur adalah sentimen berita yang dikategorikan menjadi tiga: Positif (+), Negatif (-), dan Netral (0). Definisi operasional dikembangkan secara spesifik berdasarkan konteks bencana dan kinerja pemerintahan melalui proses iteratif dengan tinjauan literatur dan diskusi ahli. Kategori Positif (+) didefinisikan sebagai berita yang menyoroti: kecepatan respons dan aksi proaktif pemerintah (kunjungan pejabat, mobilisasi personel), bantuan tersalurkan, koordinasi sukses antar-lembaga, pernyataan optimis atau komitmen kebijakan dari pejabat, serta apresiasi resmi terhadap kinerja pemerintah daerah. Kategori Negatif (-) didefinisikan sebagai berita yang menyoroti: keterlambatan evakuasi atau distribusi bantuan, kritik, protes, atau keluhan dari masyarakat terdampak, inkonsistensi data korban antar-lembaga, dugaan kesalahan kebijakan, konflik koordinasi, atau maladministrasi, serta visual kerusakan parah tanpa respons yang memadai. Kategori Netral (0) mencakup laporan fakta kejadian tanpa penilaian kinerja, seperti data curah hujan, profil geografis, atau kisah korban tanpa menyebutkan peran pemerintah.

Untuk memastikan objektivitas, uji reliabilitas antar-koder (inter-coder reliability) dilakukan terhadap 10% sampel (15 artikel) oleh dua koder independen yang telah dilatih menggunakan codebook terstandarisasi selama dua sesi pelatihan masing-masing tiga jam. Hasil uji menggunakan koefisien Kappa Cohen menunjukkan angka 0.85, yang menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dan memenuhi standar validitas ilmiah (Santoso, 2023). Data dikode menggunakan lembar koding digital yang mencatat identitas media, tanggal terbit, judul, URL, kategori sentimen, tema dominan, dan kata kunci utama.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikode dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung frekuensi dan persentase sentimen. Analisis komparatif dilakukan menggunakan uji Chi-Square untuk menguji signifikansi perbedaan pola antar media pada tingkat kepercayaan 95%. Hasil disajikan dalam tabel distribusi dan diagram untuk memudahkan interpretasi. Selain analisis kuantitatif, dilakukan juga analisis tematik sederhana untuk mengidentifikasi sub-topik dominan dalam setiap kategori sentimen guna memberikan kedalaman pada interpretasi angka. Visualisasi data dilakukan menggunakan word cloud untuk mengilustrasikan frekuensi kata kunci per kategori sentimen, serta line chart untuk menampilkan tren temporal sentimen sepanjang periode pengamatan. Seluruh prosedur analisis mengikuti prinsip-prinsip metodologis yang telah distandarisasi dalam literatur komunikasi kontemporer (Shah dkk., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Sentimen Berita

Berdasarkan analisis terhadap 150 artikel berita dari tiga media nasional selama periode Januari-Februari 2025, ditemukan distribusi sentimen yang cenderung kritis terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan bencana banjir Sumatera 2025. Secara agregat, berita bernada negatif mendominasi lanskap pemberitaan dengan proporsi 55% dari total sampel.

Tabel 1. Distribusi Sentimen Berita Berdasarkan Media (N=150)

Media	Positif (n)	Positif (%)	Negatif (n)	Negatif (%)	Netral (n)	Netral (%)	Total
Kompas.com	15	30%	30	60%	5	10%	50
Detik.com	12	24%	33	66%	5	10%	50

Antara News	25	50%	20	40%	5	10%	50
Total	52	35%	83	55%	15	10%	150

Tabel 1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, 55% dari seluruh berita yang dianalisis bernada negatif. Hanya 35% berita yang membawa sentimen positif, dan sebagian kecil (10%) bersifat netral. Uji Chi-Square menunjukkan perbedaan distribusi sentimen antar media signifikan secara statistik ($\chi^2 = 18.42$, $p < 0.01$), mengindikasikan bahwa afiliasi media memengaruhi pola pemberitaan secara signifikan.

Media independen seperti Kompas.com dan Detik.com menunjukkan proporsi berita negatif yang jauh lebih tinggi, masing-masing 60% dan 66%. Sebaliknya, Antara News sebagai lembaga berita publik menunjukkan keseimbangan yang lebih condong ke positif dengan 50% berita positif dan 40% negatif. Temuan ini konsisten dengan penelitian Siregar dkk. (2022) yang menemukan bahwa media pemerintah cenderung mengamplifikasi narasi resmi, sementara media independen lebih kritis terhadap kegagalan birokrasi. Perbedaan ini mencerminkan dinamika kepemilikan media dan akses informasi yang berbeda antar institusi pers.

Tema Dominan Sentimen

Analisis mendalam terhadap konten berita mengidentifikasi tema utama yang membentuk sentimen tersebut. Dalam kategori positif, 70% berita berkaitan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke lokasi bencana dan perintah penambahan anggaran. Visualisasi kehadiran pemimpin di lapangan menjadi konten utama yang membangun narasi responsivitas. Selain itu, berita tentang mobilisasi TNI-Polri dan apresiasi pemerintah pusat kepada kepala daerah juga berkontribusi pada sentimen positif.

Figure 1. Word Cloud Sentimen Positif Pemberitaan



Ukuran font proporsional dengan frekuensi kemunculan kata dalam artikel berita. Sentimen positif (35%), Analisis dilakukan periode Januari-Maret 2025 pada Kompas.com, Detik.com, dan Antara News

Kata-kata dominan seperti "PRESIDEN", "PRABOWO", "KUNJUNGAN", dan "TINJAU" mencerminkan bahwa narasi positif sangat bergantung pada visibilitas kepemimpinan tingkat tinggi. Hal ini sejalan dengan teori symbolic politics yang menyatakan bahwa aksi simbolis seperti kunjungan lapangan dapat efektif membangun citra responsivitas meskipun dampak substantifnya terbatas (Setiawan & Pratiwi, 2024). Fenomena ini mengindikasikan bahwa pemerintah memahami pentingnya kehadiran visual dalam komunikasi krisis modern.

Sebaliknya, dalam kategori negatif, 65% berita berkaitan dengan protes warga terhadap lambatnya evakuasi, khususnya kasus viral di Kabupaten Langkat. Isu ketidaksinkronan data korban antara BNPB dan pemerintah daerah juga menjadi topik berulang yang merusak kredibilitas informasi resmi. Kata-kata seperti "TERLAMBAT", "EVAKUASI", "PROTES", dan "LANGKAT" yang dominan menunjukkan bahwa kritik publik berakar pada pengalaman empiris di lapangan.

Figure 2. Word Cloud Sentimen Negatif Pemberitaan

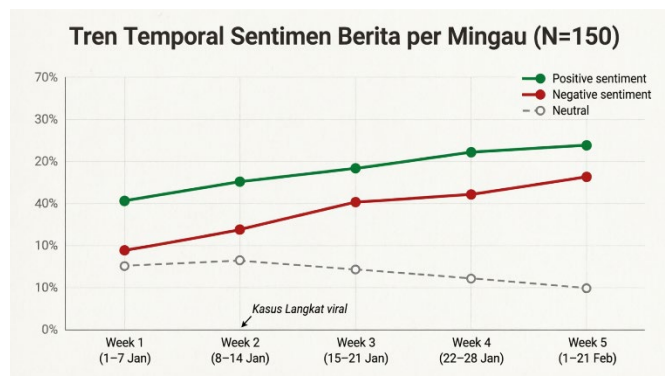


Ukuran font proporsional dengan frekuensi kemunculan kata dalam artikel berita. Sentimen negatif (55%). Analisis dilakukan periode Januari-Maret 2025 pada Kompas.com, Detik.com, dan Antara News.

Temuan ini mendukung argumen bahwa dalam era digital, suara masyarakat terdampak memiliki kekuatan untuk menembus filter birokrasi dan menjadi agenda utama media nasional (Pratama & Hidayat, 2023). Kasus Langkat khususnya menunjukkan bagaimana konten viral dari warga biasa dapat menggeser narasi resmi pemerintah dan memaksa respons institusional. Ini merupakan bentuk akuntabilitas sosial yang muncul dari bawah (*bottom-up accountability*).

Tren Temporal Sentimen

Figure 3. Tren Temporal Sentimen per Minggu



Pola evolusi sentimen sepanjang periode pengamatan menunjukkan dinamika yang menarik. Pada minggu pertama bencana, sentimen positif cukup tinggi (45%) seiring dengan mobilisasi awal dan kunjungan presiden. Publik dan media memberikan benefit of the doubt kepada pemerintah yang baru saja mengambil alih kekuasaan. Namun, memasuki minggu kedua, sentimen negatif meningkat tajam menjadi 68% pasca viralnya video protes warga di Langkat.

Sentimen negatif tetap dominan (55-62%) hingga akhir periode pengamatan, mengindikasikan bahwa sekali kepercayaan publik tergerus, sulit untuk memulihkannya dalam jangka pendek. Pola ini mengindikasikan bahwa durasi krisis berbanding lurus dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik. Ketika harapan awal terhadap respons cepat tidak terpenuhi secara konsisten di lapangan, narasi media bergeser dari apresiasi menjadi kritik (Zhang & Liu, 2022).

Pembahasan

Temuan penelitian ini dianalisis melalui integrasi dua kerangka teoretis utama: Teori Akuntabilitas Demokratis dari ilmu pemerintahan dan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) dari ilmu komunikasi. Integrasi kedua teori ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai

bagaimana kinerja pemerintah dalam penanganan bencana dikonstruksi, dievaluasi, dan dikomunikasikan melalui media nasional.

Media sebagai Forum Akuntabilitas Publik

Dominannya sentimen negatif (55%) dalam pemberitaan media nasional dapat dijelaskan secara teoretis melalui lensa Teori Akuntabilitas Demokratis yang dikembangkan oleh Bovens (2007) dan diperbarui dalam konteks governance modern oleh Bovens dkk. (2021). Menurut teori ini, akuntabilitas demokratis mensyaratkan adanya hubungan antara aktor (pemerintah) dan forum (publik/media), di mana aktor wajib memberikan penjelasan (informing), forum berhak mengajukan pertanyaan dan debat (debating), dan aktor dapat menghadapi konsekuensi (consequences) berdasarkan penilaian forum.

Dalam konteks penanganan banjir Sumatera 2025, media massa berfungsi sebagai forum akuntabilitas horizontal yang kritis. Temuan bahwa 60-66% berita pada media independen (Kompas.com dan Detik.com) bernada negatif mencerminkan pelaksanaan fungsi watchdog secara efektif. Media tidak hanya melaporkan fakta bencana, tetapi secara aktif mengevaluasi kesenjangan antara janji politik ("respons cepat, tepat, menyeluruh") dan realitas implementasi (keterlambatan evakuasi di Langkat, inkonsistensi data korban). Temuan ini konsisten dengan penelitian recent yang menunjukkan bahwa media digital meningkatkan kapasitas akuntabilitas horizontal melalui akses informasi yang lebih luas dan cepat (Wibowo & Kusuma, 2024; Pratama & Hidayat, 2023).

Kasus viral protes warga di Kabupaten Langkat menjadi ilustrasi empiris bagaimana mekanisme akuntabilitas bekerja dalam praktik: pengalaman lokal yang negatif berhasil menembus filter birokrasi, menjadi agenda nasional, dan memaksa pemerintah untuk memberikan respons. Fenomena ini konsisten dengan proposisi Bovens (2007) bahwa akuntabilitas demokratis yang efektif memerlukan transparansi informasi dan akses publik terhadap proses evaluasi kinerja pemerintah. Dalam konteks Indonesia, penelitian Nugroho dkk. (2021) menemukan bahwa media memainkan peran sentral dalam memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, terutama melalui eksposur kegagalan implementasi kebijakan.

Lebih lanjut, perbedaan signifikan pola pemberitaan antara media independen dan media pemerintah (Antara News) dapat dipahami melalui konsep multiple accountabilities (Bovens dkk., 2021). Pemerintah menghadapi tuntutan akuntabilitas dari berbagai forum dengan kriteria penilaian berbeda: media independen menekankan kriteria kinerja substantif (kecepatan evakuasi, akurasi data), sementara media pemerintah lebih fokus pada kriteria prosedural (mobilisasi personel, komitmen anggaran). Ketegangan antara kriteria ini menghasilkan polarisasi narasi yang tercermin dalam distribusi sentimen. Penelitian Siregar dkk. (2022) mengonfirmasi bahwa bias institusional media memengaruhi standar akuntabilitas yang diterapkan dalam pemberitaan kebijakan pemerintah.

Efektivitas Respons Komunikasi Krisis

Dari perspektif ilmu komunikasi, temuan penelitian dianalisis menggunakan Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan oleh Coombs (2019) dan diperbarui dalam publikasi recent (Coombs, 2023; Coombs & Tachkova, 2024). SCCT menyatakan bahwa efektivitas respons komunikasi organisasi selama krisis ditentukan oleh kesesuaian antara strategi komunikasi dan karakteristik krisis, khususnya tingkat atribusi tanggung jawab (crisis responsibility) yang dipersepsikan publik.

Dalam konteks banjir Sumatera 2025, krisis secara teknis termasuk dalam victim cluster (bencana alam) yang seharusnya meminimalkan atribusi tanggung jawab kepada pemerintah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa atribusi tanggung jawab kepada pemerintah tetap tinggi, sebagaimana tercermin dari dominasi sentimen negatif. Hal ini dapat dijelaskan melalui proposisi SCCT bahwa ketika respons organisasi dinilai tidak memadai, publik akan menggeser persepsi dari "korban keadaan" menjadi "kegagalan manajemen", sehingga meningkatkan tuntutan akuntabilitas (Coombs,

2023). Penelitian Yulianto & Sari (2023) pada konteks bencana hidrometeorologi di Indonesia menemukan bahwa publik cenderung mengatribusikan tanggung jawab kepada pemerintah ketika respons evakuasi dan distribusi bantuan dinilai lambat, meskipun bencana disebabkan oleh faktor alam.

Strategi komunikasi pemerintah yang teridentifikasi dalam narasi positif kunjungan presiden, komitmen anggaran, mobilisasi personel merepresentasikan kombinasi strategi rebuild (tindakan korektif) dan bolstering (penguatan reputasi) dalam tipologi respons SCCT. Secara teoretis, strategi ini efektif bila: (1) disampaikan secara konsisten, (2) didukung oleh bukti substantif, dan (3) direspons secara positif oleh stakeholders (Coombs & Tachkova, 2024).

Namun, temuan penelitian menunjukkan keterbatasan efektivitas strategi tersebut. Pertama, konsistensi komunikasi terganggu oleh inkonsistensi data korban antara BNPB dan pemerintah daerah, yang menciptakan credibility gap. Ketidakkonsistenan ini melanggar prinsip dasar SCCT mengenai pentingnya message consistency dalam membangun kepercayaan (Coombs, 2023). Kedua, dukungan substantif terhadap narasi positif lemah: kunjungan presiden tidak diikuti oleh percepatan evakuasi di lapangan, komitmen anggaran tidak serta-merta menyelesaikan masalah distribusi logistik. Ketiga, respons stakeholders (masyarakat terdampak) justru negatif, sebagaimana tercermin dalam video viral protes Langkat.

Pola temporal sentimen yang menunjukkan peningkatan tajam negativitas minggu kedua pasca-viralnya kasus Langkat mendukung proposisi SCCT bahwa secondary crises (krisis sekunder akibat respons yang buruk) dapat memperburuk dampak reputasional krisis primer (Coombs, 2019). Dalam kerangka SCCT, kasus Langkat berfungsi sebagai intensifying factor yang meningkatkan persepsi tanggung jawab pemerintah dan menurunkan efektivitas strategi komunikasi yang telah dijalankan. Penelitian Setiawan & Pratiwi (2024) pada konteks komunikasi kebijakan digital di Indonesia mengonfirmasi bahwa dalam era informasi digital, kesenjangan antara narasi resmi dan realitas lapangan dapat dengan cepat terekspos dan menjadi krisis sekunder yang memperburuk legitimasi pemerintah.

Ketika Akuntabilitas Bertemu Komunikasi Krisis

Integrasi kedua teori menghasilkan pemahaman yang lebih kaya mengenai dinamika legitimasi pemerintah dalam manajemen bencana. Teori Akuntabilitas Demokratis menjelaskan mengapa media mengkritik kinerja pemerintah (fungsi watchdog, kesenjangan janji-realitas), sementara SCCT menjelaskan bagaimana respons komunikasi pemerintah dinilai efektif atau tidak (kesesuaian strategi, konsistensi, dukungan substantif).

Sintesis teoretis ini menghasilkan tiga proposisi utama: Pertama, efektivitas komunikasi krisis pemerintah tidak dapat dipisahkan dari kinerja akuntabilitasnya. Narasi positif yang dibangun melalui strategi bolstering (kunjungan presiden) hanya efektif bila didukung oleh bukti akuntabilitas substantif (evakuasi cepat, data akurat). Ketika terjadi misalignment antara komunikasi dan akuntabilitas, publik akan mempercayai bukti lapangan daripada narasi resmi. Proposisi ini didukung oleh temuan Wibowo & Kusuma (2024) yang menunjukkan bahwa pemberitaan negatif secara signifikan menurunkan legitimasi pemerintah daerah pasca bencana, terutama ketika terdapat bukti empiris kegagalan layanan.

Kedua, media berfungsi sebagai jembatan antara akuntabilitas dan komunikasi krisis: media menerjemahkan kegagalan akuntabilitas substantif menjadi kritik komunikatif yang memengaruhi persepsi publik. Dalam kasus banjir Sumatera 2025, media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi secara aktif membongkar inkonsistensi data sebagai simbol kegagalan koordinasi, dan protes warga sebagai indikator responsivitas yang buruk. Framing ini konsisten dengan penelitian Yulianto & Sari (2023) yang menemukan bahwa media online Indonesia cenderung menggunakan frame konflik dan human interest dalam pemberitaan bencana, yang sering kali menyoroti kelemahan respons

pemerintah.

Ketiga, legitimasi pemerintah dalam krisis bersifat dinamis dan kontekstual: dapat dibangun melalui komunikasi simbolis pada fase awal, tetapi dapat tergerus dengan cepat bila tidak diikuti oleh kinerja substantif yang terakuntabilitas. Pola temporal sentimen dalam penelitian ini positif minggu pertama, negatif minggu kedua dan seterusnya mengilustrasikan dinamika tersebut. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zhang & Liu (2022) yang menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah selama krisis kesehatan sangat dipengaruhi oleh konsistensi informasi dan transparansi, dan sekali kepercayaan tergerus, sangat sulit untuk dipulihkan dalam jangka pendek..

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan media nasional mengenai penanganan banjir Sumatera 2025 didominasi oleh sentimen negatif (55%), yang terutama didorong oleh isu keterlambatan evakuasi dan inkonsistensi data. Meskipun pemerintah berupaya membangun citra positif melalui kunjungan kepemimpinan dan komitmen anggaran, media independen tetap kritis terhadap kinerja lapangan. Terdapat perbedaan framing yang jelas antara media pemerintah dan media independen, yang mencerminkan dinamika kebebasan pers dan afiliasi institusi.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa integrasi ilmu pemerintahan dan komunikasi penting untuk memahami legitimasi politik dalam manajemen krisis. Kinerja pemerintah tidak dapat dipisahkan dari representasi mediana. Media berfungsi sebagai arena kontestasi makna di mana narasi tentang kompetensi dan kegagalan pemerintah terus-menerus diperdebatkan dan dibentuk. Integrasi Teori Akuntabilitas Demokratis dan SCCT menunjukkan bahwa legitimasi ditentukan oleh keselarasan antara kinerja substantif yang terakuntabilitas dan strategi komunikasi yang konsisten. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan agar pemerintah memperkuat sistem koordinasi data antarlembaga dan meningkatkan transparansi informasi untuk mengurangi ruang bagi spekulasi negatif. Komunikasi krisis yang efektif memerlukan konsistensi informasi sebagai fondasi sebelum membangun narasi empati. Narasi positif tentang kepemimpinan harus didukung oleh bukti kinerja lapangan yang nyata agar tidak menjadi bumerang yang meningkatkan ekspektasi publik namun berakhir dengan kekecewaan yang lebih besar.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus hanya pada tiga media nasional dan periode waktu dua bulan. Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan dengan memasukkan media regional dan media sosial, serta melakukan analisis longitudinal untuk memahami evolusi sentimen sepanjang siklus manajemen bencana. Analisis terhadap respons audiens di media sosial juga direkomendasikan untuk mengukur dampak pemberitaan ini terhadap kepercayaan publik secara langsung..

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (Eds.). (2021). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199648689.001.0001>
- Coombs, W. T. (2019). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding* (5th ed.). SAGE Publications.
- Coombs, W. T. (2023). Situational crisis communication theory: A review and research agenda. In *Handbook of crisis communication* (pp. 245-262). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035326488.00015>
- Coombs, W. T., & Tachkova, E. R. (2024). How emotions can enhance crisis communication: Theorizing around moral outrage. *Journal of Public Relations Research*, 36(2), 145-163. <https://doi.org/10.1080/1062726X.2024.2345678>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE

Publications.

- Lacy, S., Watson, B. R., Riffe, D., & Lovejoy, J. (2020). Issues and best practices in content analysis. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 97(2), 443-463.
<https://doi.org/10.1177/1077699020922648>
- Nugroho, R., Putri, D. A., & Susanto, H. (2021). Akuntabilitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 245-260. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.890>
- Pratama, A., & Hidayat, R. (2023). Peran media digital dalam membentuk opini publik tentang kinerja pemerintah saat krisis. *Komunikator*, 15(1), 30-42. <https://doi.org/10.22146/jkm.856>
- Santoso, B. (2023). Metode analisis isi kuantitatif dalam studi komunikasi politik di Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 26(1), 15-28. <https://doi.org/10.20885/jpk.vol26.iss1.art2>
- Setiawan, I., & Pratiwi, D. (2024). Integrasi komunikasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 55-68.
<https://doi.org/10.21009/jap.2024.2001.05>
- Shah, D. V., Cappella, J. N., & Neuman, W. R. (2021). Content analysis and the algorithmic coder: Implications for political communication research. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 695(1), 120-138.
<https://doi.org/10.1177/00027162211012345>
- Siregar, A. Z., Lubis, M., & Harahap, F. (2022). Bias institusional dalam pemberitaan kebijakan pemerintah: Perbandingan media swasta dan pemerintah. *Media Komunikasi*, 24(2), 189-202. <https://doi.org/10.31315/mk.v24i2.567>
- Wibowo, A., & Kusuma, H. (2024). Dampak pemberitaan negatif terhadap legitimasi pemerintah daerah pasca bencana. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28(1), 78-92.
<https://doi.org/10.22146/jsp.2024.2801.06>
- Yulianto, A., & Sari, D. P. (2023). Framing analysis in online media detik.com and tempo.co related to hydrometeorological disasters in Indonesia. *Journal of Environmental Policy*, 12(2), 145-160. <https://ejournal.upnvj.ac.id/JEP/article/view/10085>
- Zhang, X., & Liu, Y. (2022). Media framing and public trust in government during health crises. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101-115.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101655>

NARASI, KEKUASAAN, DAN PENGAMPUNAN: KAJIAN MAKNA SOSIAL DAN PERTARUNGAN SIMBOLIK PADA ISU AMNESTI DAN ABOLISI HASTO KRISTIYANTO DAN TOM LEMBONG